

Analisis Implementasi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah

Bagus Tri Wicaksono¹, Wahyu Hidayat², Muhammad Mughni Labib³

¹ Universitas Lumajang, Indonesia; bagustriwicaksono99@gmail.com

² Universitas Lumajang, Indonesia; chocotime684@gmail.com

³ Universitas Lumajang, Indonesia; denlabib77@gmail.com

IDAROTUNA: Jurnal Administrative Science

Vol 6 No 2 November 2025

<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i2.161>

Received: November 06, 2025

Accepted: November 19, 2025

Published: November 30, 2025

Publisher's Note: Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Regional autonomy grants broad powers to local governments to manage government affairs and implement public policies according to the needs of local communities. This study analyzes the implementation of public policies in the regional autonomy era by examining various factors influencing their success and obstacles. Through a qualitative approach, including literature review and policy document analysis, this study finds that public policy implementation in the regional autonomy era is influenced by human resource capacity, budget availability, inter-institutional coordination, and community participation. The results indicate that although regional autonomy provides flexibility in policymaking, various challenges remain in its implementation, such as capacity gaps between regions, fiscal constraints, and a lack of vertical and horizontal coordination.

Keywords: *Public Policy, Regional Autonomy, Policy Implementation, Regional Government, Decentralization*

Pendahuluan

Era reformasi di Indonesia membawa perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan, salah satunya melalui penerapan otonomi daerah. Kebijakan ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diperbarui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi memberikan hak bagi pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip kemandirian dan tugas pembantuan (Republik Indonesia, 2014). Pergeseran dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi diharapkan mampu mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, serta mempercepat pembangunan di tingkat lokal.

Pelaksanaan kebijakan publik dalam kerangka otonomi daerah menjadi kunci penting untuk mewujudkan tujuan desentralisasi, yakni efisiensi, efektivitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Nugroho, 2017). Dengan kekuasaan lebih luas, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Hal ini membuka peluang lahirnya kebijakan yang lebih kontekstual dan inovatif, serta mampu menjawab persoalan spesifik masyarakat (Prasojo & Kurniawan, 2018).

Namun, praktik implementasi kebijakan publik di era otonomi daerah tidak lepas dari berbagai hambatan. Perbedaan kapasitas antardaerah, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan (Suwitri, 2019). Kesenjangan semakin nyata antara daerah yang memiliki sumber daya memadai dengan daerah tertinggal yang ketergantungan pada dana transfer pusat. Selain itu, politisasi kebijakan dan praktik korupsi di tingkat lokal turut menjadi tantangan serius (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana proses pelaksanaan kebijakan publik dijalankan dalam era otonomi daerah, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan, serta strategi yang dapat meningkatkan efektivitasnya. Seperti yang ditegaskan Winarno (2018), memahami bagaimana kebijakan publik diterapkan tidak hanya membantu dalam pengembangan teori, tetapi juga memberikan saran praktis untuk para pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan publik di era otonomi daerah. Melalui metode ini, peneliti dapat menelaah aspek-aspek kompleks yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh dan sesuai konteks lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan meninjau berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, digunakan pula analisis dokumen terhadap regulasi, peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah. Data sekunder berupa statistik dan laporan dari instansi pemerintah turut dimanfaatkan untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran empiris mengenai kondisi implementasi di berbagai wilayah.

Data yang didapat lalu dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan analisis deskriptif. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui tahap membaca, mengelompokkan, dan menginterpretasi data, sehingga dapat diidentifikasi pola, tema, serta temuan penting terkait faktor pendukung, hambatan, dan strategi peningkatan efektivitas implementasi kebijakan publik di era otonomi daerah.

Diskusi

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat atau mencapai tujuan tertentu. Dye (dalam Winarno, 2018) menyebut kebijakan publik sebagai "whatever governments choose to do or not to do", yang menekankan bahwa kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan.

Anderson (2015) mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu dan dijalankan oleh aktor individu maupun kelompok. Sementara itu, Dunn (2018) menekankan bahwa kebijakan publik adalah pola pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh lembaga pemerintah.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Tahap implementasi merupakan bagian krusial dalam siklus kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Edwards III (1980) kemudian mengembangkan model implementasi dengan empat variabel utama: Komunikasi: Bagaimana informasi kebijakan disampaikan dari pembuat ke pelaksana. Sumber Daya: Mencakup tenaga manusia, dana, fasilitas, dan informasi yang tersedia. Disposisi: Sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana kebijakan. Struktur Birokrasi: Aturan, prosedur, serta pembagian tugas dalam organisasi.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Prinsip otonomi di Indonesia didasarkan pada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Wahab, 2016).

Tujuan utama otonomi menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, mendorong daya saing daerah, serta menjaga hubungan harmonis antara pusat dan daerah (Republik Indonesia, 2014). Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah memiliki peluang untuk merumuskan kebijakan yang sesuai kebutuhan lokal (Samodra Wibawa, 2017).

Hasil dan Pembahasan

1. Proses Implementasi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah

Pelaksanaan kebijakan publik dalam kerangka otonomi daerah berlangsung melalui sejumlah tahapan dan melibatkan berbagai aktor. Proses dimulai dari perumusan kebijakan di tingkat lokal yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas kebijakan, mengalokasikan anggaran, membentuk struktur pelaksana, menetapkan prosedur operasional, serta melakukan monitoring dan evaluasi (Nugroho, 2017). Dalam praktiknya, DPRD berperan sebagai lembaga legislasi dan pengawas, perangkat daerah sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai penerima sekaligus pengawas kebijakan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kompetensi dan integritas aparatur sipil negara menjadi penentu kualitas pelaksanaan kebijakan. Daerah dengan SDM yang kompeten, profesional, dan memiliki integritas tinggi cenderung lebih berhasil mengimplementasikan kebijakan publik (Prasojo & Kurniawan, 2018). Namun, masih ada kesenjangan kapasitas SDM antara daerah maju dan tertinggal, dan berdampak pada disparitas kualitas pelayanan publik.

b. Ketersediaan Anggaran

Kemampuan fiskal daerah menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai program dan kegiatan (World Bank, 2019). Sebaliknya, daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menghadapi keterbatasan dalam inovasi kebijakan.

c. Koordinasi Antar-Lembaga

Implementasi kebijakan publik memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai organisasi perangkat daerah, koordinasi vertikal dengan pemerintah pusat, serta koordinasi horizontal dengan daerah lain (Suwitri, 2019). Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih program, inefisiensi anggaran, dan konflik kewenangan.

d. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas pemerintah (Wahab, 2016). Ini dapat diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*), forum konsultasi publik, dan sistem pengaduan.

e. Kepemimpinan Daerah

Komitmen dan kepemimpinan kepala daerah sangat mempengaruhi arah dan prioritas kebijakan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Winarno (2018), kepala daerah yang memiliki visi jelas, komitmen kuat terhadap pelayanan publik, dan kemampuan memobilisasi sumber daya akan mendorong implementasi kebijakan yang lebih efektif.

3. Hambatan dan Tantangan Implementasi Kebijakan Publik

a. Kesenjangan Kapasitas Antardaerah

Indonesia memiliki 514 kabupaten/kota dengan karakteristik yang beragam. Kesenjangan kapasitas kelembagaan, SDM, dan fiskal antardaerah menyebabkan disparitas dalam kualitas implementasi kebijakan publik (Kementerian Dalam Negeri, 2020). Daerah dengan kapasitas terbatas seringkali mengalami kesulitan dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

b. Keterbatasan Fiskal

Mayoritas daerah di Indonesia ketergantungan pada dana transfer pusat sehingga membatasi ruang inovasi kebijakan dan menyesuaikan prioritas dengan kebutuhan lokal (World Bank, 2019). Selain itu, *earmarking* atau pengalokasian anggaran untuk pos-pos tertentu mengurangi fleksibilitas daerah dalam pengelolaan anggaran.

c. Koordinasi yang Belum Optimal

Walaupun otonomi daerah memberi kekuasaan luas pada daerah, masih diperlukan kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat dan daerah lain. Dalam praktiknya, koordinasi vertikal dan horizontal seringkali menghadapi kendala seperti ego sektoral, perbedaan interpretasi regulasi, dan kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif (Suwitri, 2019).

d. Politisasi Kebijakan

Era otonomi daerah yang diwarnai dengan pemilihan kepala daerah langsung membawa implikasi politisasi dalam proses kebijakan publik. Menurut Nugroho (2017), kebijakan seringkali lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek daripada kepentingan publik jangka panjang. Pergantian kepala daerah juga dapat menyebabkan diskontinuitas program dan kebijakan.

e. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Desentralisasi kewenangan tanpa disertai dengan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang solid berpotensi meningkatkan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah (Wahab, 2016). Beberapa kasus korupsi kepala daerah menunjukkan lemahnya sistem kontrol dan pengawasan dalam implementasi kebijakan publik.

4. Strategi Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik

a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah perlu melakukan program capacity building secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara di daerah (Prasojo & Kurniawan, 2018). Program ini mencakup pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan, dan peningkatan kompetensi dalam perencanaan dan penganggaran.

b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Daerah perlu memaksimalkan PAD melalui peningkatan dan perluasan pajak serta retribusi lokal, pengembangan badan usaha milik daerah, dan peningkatan investasi

(World Bank, 2019). Namun, upaya ini harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat.

c. Penguatan Sistem Koordinasi

Perlu dikembangkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif melalui pembentukan forum koordinasi reguler, sistem informasi terintegrasi, dan kejelasan pembagian kewenangan (Suwitri, 2019).

d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah daerah harus memberi kesempatan kepada masyarakat/publik untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi dan partisipasi, penguatan lembaga masyarakat sipil, dan penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses (Wahab, 2016).

e. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Implementasi kebijakan publik perlu didukung dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang berfokus pada data dan evidence-based policy (Winarno, 2018). Hasil evaluasi harus menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan.

f. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Penguatan sistem transparansi melalui keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas melalui mekanisme pengawasan internal/eksternal yang efektif dalam mengurangi tindakan korupsi dan memperbaiki kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah.

Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan publik di era otonomi daerah merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tujuan desentralisasi, yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta responsivitas pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, partisipasi masyarakat, serta kepemimpinan kepala daerah.

Hambatan yang muncul meliputi kesenjangan kapasitas antardaerah, keterbatasan fiskal, koordinasi yang belum optimal, politisasi kebijakan, serta praktik korupsi di tingkat lokal. Efektivitas implementasi kebijakan publik dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pendapatan asli daerah, penguatan sistem koordinasi, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat perlu menyediakan program *capacity building* yang berkelanjutan, mereformulasi sistem transfer fiskal untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada daerah, serta memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang.
2. Pemerintah daerah harus mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data, meningkatkan koordinasi internal antar-OPD dan eksternal dengan stakeholder, membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem informasi publik yang mudah diakses.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kasus empiris di berbagai daerah guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak implementasi kebijakan publik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Referensi

- Anderson, James E. (2015). *Public Policymaking: An Introduction*. Boston: Cengage Learning.
- Dewantara, K. H. (2013). *Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. New York: Pearson.
- Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press. Jakarta: World Bank Group. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 2, hlm. 145-167.
- Kemendikbudristek. (2021). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019*. Jakarta: Kemendagri. New York: Routledge.
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prasojo, Eko & Kurniawan, Teguh. (2018). "Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia". *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 5, No. 1, hlm. 75-95.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sallis, E. (2012). *Total Quality Management in Education*. London: Routledge.
- Samodra Wibawa. (2017). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Suwitri, Sri. (2019). "Implementasi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah".
- Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration and Society*, Vol. 6, No. 4, hlm. 445-488.
- Wahab, Solichin Abdul. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2018). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*.

World Bank. (2019). *Indonesia Economic Quarterly: Investing in People*. Yogyakarta: CAPS.